

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	8
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM s/d September 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8	
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM.....	14
1.1    Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	16
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM.....	20
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3.2.    Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .....	22
2.3.3.    Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).....	23
2.3.4.    Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah 23	
2.3.5.    Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .....	23
2.4    Review Terhadap Rancangan Akhir RKPd .....	24
2.5.    Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	43
3.1    Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2    Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD .....	44
3.3    Program dan Kegiatan .....	45
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 .....	54
BAB V P E N U T U P .....	58

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan gambaran rencana kegiatan pada tahun 2026, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja di tahun 2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 ini semoga ikhtiar kita semua mendapatkan karunia Allah SWT.

### KEPALA BADAN



**H. MUKTI, SE, ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pembinaan kompetensi aparatur dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian, maka Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026 diupayakan terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jambi. serta harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, berupaya melakukan evaluasi dan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2026 dibuat oleh Tim Penyusun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan kompetensi aparatur.

### 1.2. Landasan Hukum

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Permendagri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi unit-unit dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dinas-Dinas Teknis. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. lembaga-lembaga teknis dan Rumah sakit daerah Provinsi Jambi
- k. Instruksi Gubernur Jambi. Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu.
- l. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Agar mampu tetap tampil secara konsisten. responsive dan unggul pada persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. maka suatu instansi pemerintah harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut harus gradual. konsisten dan berkelanjutan. sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu rencana yang menjelaskan mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah:

1. Menjadi perekat dan pemersatu berbagai Rancangan Akhir Rencana Kerja yang ada;
2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi selama satu tahun serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Akhir Rencana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN :

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Reenja dimaksudkan berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun lalu, dan perkiraan capaian tahun berjalan., mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja BPSDM sudah disahkan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD  
Berisikan uraian mengenai:
    1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
    2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
    3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).  
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
    1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
    2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### C. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah  
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Berisikan penjelasan mengenai:
  - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    - Jumlah program dan jumlah kegiatan
    - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### D. BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### E. BAB V. PENUTUP

- Berisikan uraian penutup, berupa:
- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
  - c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN LALU

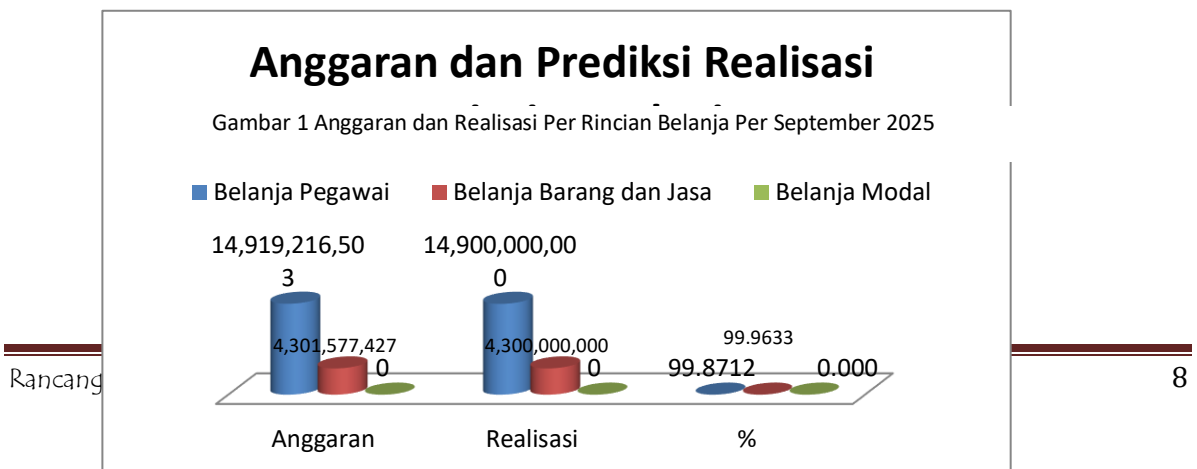
#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM s/d September 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Aparatur Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja optimalnya. hal ini ditandai dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tuntutan peningkatan kesejahteraan masih terus dirasakan dan didengarkan. Dalam memenuhi tuntutan ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, produktif, transparan, bebas KKN dan netral yang pada gilirannya dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan kepada semua pihak tanpa membedakan asal usul ataupun dari partai politik tertentu

Pada tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Rancangan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 pelaksanaan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang ditunjang dengan APBD murni untuk belanja daerah sebesar Rp. 20.423.864.210,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 20.423.864.210,-, yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan sebagaimana pada grafik dibawah ini :

Realisasi anggaran Perubahan tahun 2025 per September 2025 dari masing-masing belanja meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 9.197.816.391,-, sama dengan 66,73% Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 5.512.179.951,94,- sama dengan 71,08% Belanja modal Rp. 621.069.199,- sama dengan 98,94% sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 2 Anggaran dan Prediksi Realisasi Per Rincian Belanja

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja s/d September 2025 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi  
per September 2025**

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>SILPA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>262.836.371,08</b>	<b>194.714.494,00</b>	<b>74,08</b>	<b>68.121.877,08</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.544.991,08	90.076.261,00	69,00	40.468.730,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.291.380,00	104.638.233,00	93,18	7.653.147,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.993.755.031,00</b>	<b>9.334.836.391,00</b>	<b>66,71</b>	<b>4.658.918.640,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.784.475.031,00	9.197.816.391,00	66,73	4.586.658.640,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.280.000,00	137.020.000,00	65,47	72.260.000,00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>194.400.000,00</b>	<b>132.105.490,00</b>	<b>67,96</b>	<b>62.294.510,00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.400.000,00	74.325.600,00	99,90	74.400,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	57.779.890,00	48,15	62.220.110,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>320.558.099,90</b>	<b>271.158.220,00</b>	<b>84,59</b>	<b>49.399.879,90</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.811.400,00	70.712.880,00	72,30	27.098.520,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.146.699,90	41.861.000,00	70,77	17.285.699,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.600.000,00	158.584.340,00	96,93	5.015.660,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.562.415.675,00</b>	<b>1.893.190.980,00</b>	<b>73,88</b>	<b>669.224.695,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	765.000.000,00	452.352.616,00	59,13	312.647.384,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.797.415.675,00	1.440.838.364,00	80,16	356.577.311,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.293.220.000,00</b>	<b>1.247.134.787,94</b>	<b>96,44</b>	<b>46.085.212,06</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.444.000,00	213.137.900,00	86,84	32.306.100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.047.776.000,00	1.033.996.887,94	98,68	13.779.112,06

**Tabel 2. Daftar Realisasi Anggaran Per Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi  
per September 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
<b>I. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>1.065.985.261,00</b>	<b>721.287.121,00</b>	<b>67,66</b>	<b>344.698.140,00</b>
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.065.985.261,00	721.287.121,00	67,66	344.698.140,00
<b>II. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi</b>	<b>2.473.405.300,02</b>	<b>1.536.638.058,00</b>	<b>62,13</b>	<b>936.767.242,02</b>

<b>Manajerial dan Fungsional</b>				
Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	80.262.190,00	79.981.744,00	99,65	280.446,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	237.474.600,00	194.419.093,00	81,87	43.055.507,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	58.772.950,00	49.803.541,00	84,74	8.969.409,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan rjabatan	2.096.895.560,02	1.212.433.680,00	57,82	884.461.880,02

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan dan output yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi per September tahun 2025.

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 18.627.185.176,98,- atau sama dengan 84,03% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 22.166.575.738,-. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 262.836.371,08,- atau sebesar 1,41% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan 130.544.991,08,- sebesar 49,67% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.076.261,- atau sebesar 69% digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi program dan kegiatan.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 7,61% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar belum direalisasikan yang dipergunakan untuk cetak laporan kinerja.
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar dianggarkan sebesar Rp. 112.291.380,- atau sebesar 42,72% dari total anggaran kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar dapat direalisasikan sebesar Rp. 104.638.233,- atau sebesar 93,18% yang dipergunakan untuk monitoring evaluasi peserta pasca diklat dan monitoring evaluasi pelaksanaan orientasi lapangan.

#### **II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

dianggarkan sebesar Rp. 13.993.755.031,- atau sebesar 75,13% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 13.784.475.031,- atau sebesar 98,50% dari total anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ikhtisar dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.197.816.391,- atau sama dengan 66,73% yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN BPSDM Provinsi Jambi.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas dianggarkan sebesar Rp. 209.280.000,- atau sama dengan 1,52% dari total anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas dapat direalisasikan sebesar Rp. 137.020.000,- sama dengan 65,47% yang dipergunakan untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan BPSDM Provinsi Jambi dan honor-honor lainnya.

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dianggarkan sebesar Rp. 194.400.000,- atau sama dengan 1,04% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 74.400.000,- atau sama dengan 38,27% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.325.600,- sama dengan 99,9% yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas harian seluruh ASN.
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 120.000.000,- atau sama dengan 61,73% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dapat direalisasikan sebesar Rp. 57.779.890,- sama dengan 48,15% yang dipergunakan untuk pengembangan kompetensi aparatur internal.

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dianggarkan Rp. 320.558.099,9,- sama dengan 1,72% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebesar Rp., 97.811.400,- sama dengan 30,51% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dapat direalisasikan sebesar Rp. 70.712.880,- sama dengan 72,30% yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan listrik.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. 59146699,9,- sama dengan 18,45% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.861.000,- sama dengan 70,77% yang dipergunakan untuk penyediaan makan dan minum rapat dan tamu kantor.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 163.600.000,- sama dengan 51,04% dari total anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dari anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat direalisasikan sebesar Rp. 158.584.340,- sama dengan 96,93% yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dianggarkan Rp. 2.562.415.675,- sama dengan 13,76% dari dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik sebesar Rp. 765.000.000 sama dengan 29,85% dari total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi

- sebesar Rp. 452.352.616,- sama dengan 59,13% yang dipergunakan untuk biaya belanja air bersih, listrik, internet.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 1.797.415.675,- sama dengan 70,15% dari total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 1.440.838.364,- sama dengan 80,16% dipergunakan untuk pembayaran jasa kebersihan kantor, taman, halaman dan honorarium satpam dan PTT lainnya.
- VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dianggarkan sebesar Rp. 1.293.220.000,- sama dengan 6,94% dari total anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 245.444.000,- sama dengan 13,66% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi sebesar Rp. 213.137.900,- sama dengan 86,84% yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 71.008.402,- sama dengan 10,79% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi sebesar Rp. 64.848.402,- sama dengan 91,32% yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor.
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.047.776.000,- sama dengan 81,02% dari total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan realisasi sebesar Rp. 1.033.996.887,94,- sama dengan 96,68% dipergunakan untuk rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas dan lainnya.

## **B. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, untuk pengembangan kompetensi ASN termasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia, pada dianggarkan sebesar Rp. 3.539.390.561,02,- sama dengan 19% dari pagu indikatif tahun 2025.

- I. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis  
Dianggarkan sebesar Rp. 1065985261,- sama dengan 30,12 % dari anggaran program pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 721.287.121,- sama dengan 67,66% untuk membiayai pengembangan kompetensi teknis sebanyak 20 pengembangan kompetensi teknis, dan umum.
- II. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.  
Dianggarkan sebesar Rp. 2.473.405.300,02 sama dengan 69,88% dari anggaran Program pengembangan sumber daya manusia. yang terdiri dari :
  - a. Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 80.262.190,- atau sama dengan 3,25% dari anggaran kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merealisasikan anggaran sebesar Rp. 79.981.744,- sama dengan 99,65% yang dipergunakan untuk Sertifikasi kompetensi level-1.
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dengan anggaran sebesar Rp. 237.474.600,- sama dengan 9,60% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi merealisasikan sebesar Rp. 194.419.093,- sama dengan 81,87% yang dipergunakan untuk Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga.

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 58772950,- sama dengan 2,38% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga merealisasikan sebesar Rp. 49803541,- sama dengan 84,74% yang dipergunakan untuk Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kerjasama Kabupaten/kota.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.096.895.560,02,- sama dengan 96,05% dari anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional merealisasikan sebesar Rp. 1.212.433.680,- sama dengan 57,82% yang dipergunakan untuk 16 jenis pengembangan kompetensi.

Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target kinerja dan realisasi keuangan dengan menata sistem perencanaan dan menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dan menganalisis atas capaian kinerja program dan kegiatan sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penunjang, dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja pelayanan BPSDM tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci dari Kementerian. Capaian kinerja dan target tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi**

No	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi	Capaian Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2025 (tahun n1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)			Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis				100	100	99 %	99 %	Indicator tambahan rekomendasi BAPPEDA
2	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional				100	100	99 %	99 %	
3	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial				100	100	99 %	99 %	
4	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi				4	13,33	81 %	84 %	
5	Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur	97 %	99 %	99 %	100	105,26	99 %	99 %	
6	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi dan peserta	78 %	81 %	84 %	84,49	112,66	81 %	85 %	

**Tabel 1. Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Jambi Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan	Persentase kelulusan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	%	78	97,15	124,55	Sangat baik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE warna
2	Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	%	97	100	103,09	Sangat baik
		2. Indeks Kepuasan terhadap layanan pengembangan SDM	skor	82 (B)	84,16(B)	102,63	Sangat baik
	Rata-rata					110,09	Sangat baik

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai  $\geq$  100%**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 110,09%, atau melampaui dari target yang ditetapkan.

### 1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

2. Pada tahun 2024 capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 110,09%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :
3. Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, BPSDM Provinsi Jambi memiliki dua sasaran strategis yaitu :
- 4.
5. **Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kompetensi Aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan.**
- 6.
7. Capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase peserta pengembangan kompetensi dan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran tertera pada tabel berikut ini.
- 8.

9.

10. Tabel 3. 1 Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1 BPSDM Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian Indikator (%)
Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi	78	97,15	124,55

11. Sumber Data : BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2024

12.

13. Realisasi jumlah seluruh peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan BPSDM Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah 911 (sembilan ratus sebelas) orang yang terbagi dalam 14 (empat belas) jenis diklat. Dari seluruh peserta yang hadir adalah sebanyak 911 (Sembilan ratus sebelas) peserta dari target yang telah ditetapkan sebanyak 795 (tujuh ratus Sembilan puluh lima) orang atau 114,59%. Dari sebanyak 911 (sembilan ratus sebelas) peserta yang mengikuti ujian, sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) orang peserta yang lulus atau 97,15% dan sebanyak 26 (dua puluh enam) atau orang tidak lulus atau 2,85%, sehingga tingkat realisasi indikator kinerja adalah 124,55% dari target kinerja 78%.

14.

15. Dengan menggunakan rumus capaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada point a di atas, maka diperoleh persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis pertama yaitu 124,55% (**sangat berhasil**).

16.

17. Adapun rincian jenis diklat dan jumlah peserta yang lulus dengan nilai kompetensi minimal baik adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Rincian peserta yang telah selesai dan lulus ujian diklat pada BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Jenis Diklat	Target Peserta	Realisasi Peserta	Mengikuti Ujian	Peserta Lulus	Persentase capaian
<b>A</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis Inti</b>	<b>220</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>100</b>
1	Bimtek Penyusunan SKP	25	25	25	25	100
2	Bimtek Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	20	20	20	20	100
3	Workshop Pengawasan Harga Pasar	25	25	25	25	100

No	Jenis Diklat	Target Peserta	Realisasi Peserta	Mengikuti Ujian	Peserta Lulus	Persentase capaian
4	Webinar Pengelolaan Aset Desa	50	114	114	114	100
5	Webinar Pengurangan Resiko Bencana Banjir	50	81	81	81	100
6	Webinar Identitas Kependudukan Digital dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan	50	73	73	73	100
<b>B</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Fungsional</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
7	Workshop Penyusunan SKP Bagi Jabatan Fungsional	25	25	25	25	100
8	Workshop Administrasi Digital	25	23	23	23	100
9	Workshop Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	25	25	25	25	100
10	Workshop Tata Naskah di Lingkup Pemprov Provinsi Jambi	25	25	25	25	100
<b>C</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Menejerial</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>100</b>
11	Seminar Bagi Kasubbag Keuangan	50	50	50	50	100
12	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX	20	20	20	20	100
13	Orientasi anggota DPRD kab/kota se provinsi jambi	375	375	375	375	100
<b>D</b>	<b>BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>13,33</b>
14	Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa	30	30	30	4	13,33
	<b>Jumlah</b>	<b>795</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>885</b>	<b>97,15</b>

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.**

Capaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pelaksanaan diklat aparatur. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran tertera pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2a BPSDM Provinsi Jambi**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
	(%)		
Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur	95	100	103,09

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 13 (tiga belas) pengembangan kompetensi 1 sertifikasi. Seluruh pengembangan kompetensi, sertifikasi dan uji kompetensi seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan target dengan realisasi 100%.

**Sasaran Strategis 2b : Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
	(%)		
Indeks Kepuasan terhadap layanan pengembangan SDM	82 (B)	84,16 (A)	102,63

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 14 (empat belas) pengembangan kompetensi 1 sertifikasi. Seluruh pengembangan kompetensi, sertifikasi dan uji kompetensi seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan target dengan realisasi 100%.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM**

**2..3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah**

Tabel 4 Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2025

NO.	SASARAN STRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui pengembangan SDM	Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan peserta	%	78	97,15	124,55	Sangat baik
2	Meningkatnya sumber daya kelembagaan pengembangan SDM	3. Persentase penyelesaian program pengembangan SDM	%	97	100	103,09	Sangat baik
		4. Indeks Kepuasan terhadap	skor	82 (B)	84,16(B)	102,63	Sangat baik
	Rata-rata					110,09	Sangat baik

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Hasil laporan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pengembangan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan”, dengan indicator Persentase kelulusan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi ,

realisasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 adalah sebesar 97,15%, dan realisasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 adalah sebesar 124,55%.

2. Untuk analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya sumber daya kelembagaan Pengembangan SDM Aparatur yang memadai”, dengan indikator :
  - a. persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur dengan realisasi 100% dan realisasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 adalah sebesar 103,09%.
  - b. Indeks Kepuasan terhadap layanan pengembangan SDM dengan realisasi 84,16 (A) dan realisasi kinerja sebesar 102,63%.
3. Realisasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu :
  - a. sebesar 124,55% untuk indikator Persentase kelulusan peserta pengembangan kompetensi dan peserta sertifikasi/Uji Kompetensi, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,35%.
  - b. Sebesar 103,09% untuk indicator Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur.
  - c. Sebesar 102,63% untuk indicator Indeks Kepuasan terhadap layanan pengembangan SDM dengan efisiensi anggaran sebesar 6,71%

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti rendahnya motivasi peserta pelatihan dalam meningkatkan nilai kelulusan pelatihan.

#### 2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sedangkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui musrenbang / rapat koordinasi pada urusan pembangunan secara umum khususnya untuk bidang Aparatur yang merupakan domain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan. diantaranya; 1) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur. 2) kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu terus ditingkatkan. 3) rendahnya kesejahteraan pegawai. 4) belum optimalnya kinerja aparatur baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. kecamatan dan kelurahan/desa.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Capaian kinerja pelayanan BPSDM tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci dari Kementerian.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Peluang penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui kontribusi peserta.kabupaten/kota provinsi Jambi, luar Provinsi Jambi dan Instansi Vertikal

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah di Provinsi Jambi. Hal ini tercermin dari perolehan *Nilai SAKIP* Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan Kementerian PAN & RB dapat juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah tingkat profesionalitas aparatur pemerintah daerah kemampuan penegakan hukum dan peraturan. kapasitas pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

Hasil evaluasi penting dipergunakan sebagai dasar bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan namu terdapat perbedaan pada pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan pada BPSDM Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih dapat mengalami perubahan karena pertimbangan program dan kegiatan prioritas serta hasil capaian pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 Program dan Kegiatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi PD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai IKM	83		83	84,16(B)	102,63	83	81	81
		PREDIKAT SAKIP	81,5		73,56	73,56	100	73,56	75	75
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	72,5		35			35	70,5	70,5
5.04.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%		100%	100%	100%
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 dokumen		100 dokumen	100 dokumen		100 dokumen	10	10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 laporan		200 laporan	200 laporan		200 laporan	3	3
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan		20 laporan	20 laporan		20 laporan	2	2
5.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	2
5.04.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 org/bulan		150 org/bulan	150 org/bulan		150 org/bulan	90	90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 dokumen		7 dokumen	7 dokumen		7 dokumen	7	7
<b>5.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							2	2
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang		75 orang	75 orang		75 orang	80	80
<b>5.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2 Paket	2	2
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	8 Paket		8 Paket	8 Paket		8 Paket	4	4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							2	2
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket		7 Paket	7	7
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							12	12
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	12	12
<b>5.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							1	1
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							1	1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							10	10
<b>5.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan	1	1
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	12	12
5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	12	12
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan		4 laporan	4 laporan		4 laporan	12	12
<b>5.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit		29 Unit	29 Unit		29 Unit	52	52
5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							10	10
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit		50 Unit	50	50
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit		10 unit	10 unit		10 unit	10	10
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional</b>	4,2		3,78	3,78		3,78	3,8	3,8
		<b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</b>	100		100	100		100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	1,1		0,63	0,63		0,63	0,7	0,7
		Pesentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	6		5,37	5,37		5,37	5,5	5,5
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	100%		93%	93%		93%	100%	100%
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	700		445 orang	445 orang		445 orang	1000	1000
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi ,	100%		93%	93%		93%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	<b>Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>pengembangan kompetensi manajerial, fungsional</b>								
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	300		135 orang	135 orang		135 orang	300	300
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan	1	1
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	1	1
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	750		615 orang	615 orang		615 orang	750	750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2026)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

Tabel 11. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPd TAHUN 2026 BPSDM PROVINSI JAMBI

No	Rancangan Akhir RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>B</b>	<b>50.275.000.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Provinsi Jambi</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>B</b>	<b>13.887.087.898,0</b>
			<b>PREDIKAT SAKIP</b>	<b>B</b>	<b>1.250.000.000</b>			<b>PREDIKAT SAKIP</b>	<b>B</b>	
			<b>Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah</b>	<b>72,5</b>				<b>Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah</b>	<b>72,5</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>505.347.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>202.820.989,9</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	305.347.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	109716799,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10283739,93
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	82820450,91

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>14.190.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>10.835.021.131,0</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	14.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10670141131,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	190.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	164880000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>325.461.235</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>108.592.560,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	80.061.235	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	58592560
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	245.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	50000000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.288.373.400</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>357.090.425,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	187.811.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41987066
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	470.562.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	149.103.359,00

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
								Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6000000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140000000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>749.497.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	249.497.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.288.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.653.846.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1000000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	624750000

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.185.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.096.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>729.716.791,95</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	339.080.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	130.636.791,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	2.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	260.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional</b>	<b>3,8</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar,</b>	<b>3,8</b>	<b>1.910.000.000,00</b>

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
								Manaejerial, dan fungsional		
			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	800.000.000			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0,7	1.000.000.000			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0,7	
			Pesentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5,5	3.000.000.000			Pesentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5,5	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>100</b>	<b>860000000</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	1000	3.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	200	860000000
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsiona</b>		<b>persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan</b>	<b>100%</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsiona</b>		<b>persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000.000,00</b>

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			<b>kompetensi manajerial, fungsional</b>					<b>kompetensi manajerial, fungsional</b>		
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	300	1.000.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	30	70.000.000,00
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1	500.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1	65.000.000,00
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1	300.000.000	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1	65.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	750	3.700.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	350	850.000.000,00

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum PD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPSDM. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi seperti tersaji dalam Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 12. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Target	Rupiah (000)	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional</b>	<b>3,8</b>	<b>1.910.000.000,00</b>	
			<b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
			<b>Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi</b>	<b>0,7</b>		
			<b>Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>5,5</b>		
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>100</b>	<b>860000000</b>	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	200	860000000	
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	30	70.000.000,00	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1	65.000.000,00	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan	1	65.000.000,00	

			Kerja Sama antar Lembaga			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	350		850.000.000,00

## BAB III

### TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Kebijakan Nasional Bidang Kepegawaian khususnya Pendidikan dan Pelatihan :

**Tabel 13. Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

No	Jenis Kebijakan Nasional / Provinsi
1	<p><b>Perbaikan Tata Kelola Pemerintah</b>  <b>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>
2	<p><b>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan isu/kebijakan nasional berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik</li> </ul>
3	<p><b>Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi dengan isu/kebijakan nasional berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi</li> <li>- Penataan kelembagaan instansi pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi</li> <li>- Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah</li> <li>- Pengembangan manajemen SDM Aparatur</li> <li>- Sistem Seleksi PNS melalui <i>CAT System</i></li> <li>- Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i></li> <li>- Penerapan <i>e-Arsip</i></li> <li>- Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur</li> </ul>
4	<p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik</li> <li>- Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik</li> <li>- Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi</li> <li>- Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi</li> <li>- Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional</li> </ul>

Khusus dibidang aparatur yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah dengan pengembangan manajemen SDM aparatur berupa **peningkatan sistem merit** dalam manajemen kepegawaian, serta **peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai**. Adapun indikator untuk

penerapan sistem merit adalah berupa persentase penerapan sistem merit di setiap instansi. Sedangkan indikator untuk peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai berupa persentase pegawai yang mengikuti assesment sesuai kebutuhan. persentase pegawai yang mengikuti diklat wajib dan persentase penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja.

Sedangkan hasil perumusan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 pada misi kesatu yakni: “**Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**”. kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. yang tujuannya “mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel” dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelola dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pengelolaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Strategi meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur arah kebijakannya adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan suatu program dan kegiatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan (*never ending process*). Untuk itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembaharuan guna meningkatkan kompetensi aparatur, merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya kebijakan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dalam rangka pembaharuan secara esensial menjadi *leverage* yang berbasis kompetensi. Maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **Tujuan**

1. Terwujudnya sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi.
2. Terwujudnya BPSDM sebagai lembaga terakreditasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur secara terintegrasi di Provinsi Jambi

#### **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni;

- a. Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan ;
- b. Meningkatnya sumber daya kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2026 terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 72.925.000.00.-. Adapun rincian program dan kegiatan dari Belanja Langsung sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BPSDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja BPSDM Provinsi Jambi tahun 2026
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih. Transparan. Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik.*** Kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Dalam Misi ke -1 RPJMD Provinsi Jambi tujuan yang hendak dicapai oleh BPSDM Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun depan adalah ***Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas***

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel dibawah ini :  
Tabel 14. indikator kinerja utama BPSDM :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja Awal Periode RPJMD (2024)	Target Capaian Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2029
1	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manaejerial, dan fungsional	3,78	3,78	3,8	3,9	4	4,1	4,1
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0,63	0,63	0,7	0,8	0,9	1	1
4	Pesentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5,37	5,37	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 BESERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai IKM		B	<b>13.887.087.898,00</b>	APBD		81,5	22.850.000.000
		<b>PREDIKAT SAKIP</b>		B				80	950.000.000
		<b>Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah</b>		72,5				71	200.000.000
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		100%	<b>202.820.989,99</b>			10	300.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	109716799,15			3	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	10283739,93			2	300.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	82820450,91				

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>10.835.021.131,06</b>			<b>100%</b>	<b>14.800.000.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 Orang/ Bulan	10670141131,06			90	14.500.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	164880000			7	300.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>		<b>100%</b>	<b>108.592.560,00</b>			<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	58592560			2	250.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		80 Orang	50000000			80	300.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>		<b>100%</b>	<b>357.090.425,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.630.000.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	41987066			2	200.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	149.103.359,00			4	500.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	20.000.000,00			2	200.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6000000			7	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	140000000			12	200.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	<b>1.100.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1	700.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						10	200.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>		<b>100%</b>	<b>1.653.846.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>2.505.000.000</b>

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1000000			1	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	624750000			12	1.400.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	28.000.000,00			12	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.000.096.000,00			12	1.100.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase pemeliharaan BMD</b>		<b>100%</b>	<b>729.716.791,95</b>			<b>100%</b>	<b>2.265.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		30 Unit	339.080.000,00			52	550.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	130.636.791,95			50	300.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	260.000.000,00			10	1.265.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional</b>		<b>3,8</b>	<b>1.910.000.000,00</b>			<b>3,9</b>	<b>3.700.000.000</b>
		<b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</b>		<b>100</b>				<b>100</b>	<b>800.000.000</b>
		<b>Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi</b>		<b>0,7</b>				<b>0,8</b>	<b>1.000.000.000</b>
		<b>Pesentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>5,5</b>				<b>5,6</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis</b>		100	<b>860000000</b>			<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi		200	860000000			1000	3.000.000.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsiona</b>	<b>persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional</b>		<b>100%</b>	<b>1.050.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>5.500.000.000</b>
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi		30	70.000.000,00			300	1.000.000.000
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1	65.000.000,00			1	500.000.000
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		1	65.000.000,00			1	300.000.000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		350	850.000.000,00			750	3.700.000.000



**BAB IV**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2026	
			K	Rp
			8	9
1	2	3		
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
5.04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai IKM	B	13.887.087.898,00
		<b>PREDIKAT SAKIP</b>	B	
		<b>Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah</b>	72,5	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	202.820.989,99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	109716799,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10283739,93
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	82820450,91
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	100%	10.835.021.131,06
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10670141131,06
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	164880000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD</b>	100%	108.592.560,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58592560
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	50000000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelaksanaan administrasi umum PD</b>	<b>100%</b>	<b>357.090.425,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41987066
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	149.103.359,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6000000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140000000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1.653.846.000,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1000000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	624750000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.096.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>729.716.791,95</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	339.080.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	130.636.791,95

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	260.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional</b>	<b>3,8</b>	<b>1.910.000.000,00</b>
		<b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	
		<b>Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi</b>	<b>0,7</b>	
		<b>Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>5,5</b>	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis</b>	100	<b>860000000</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi	200	860000000
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>persentase pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi , pengembangan kompetensi manajerial, fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.000.000,00</b>
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	30	70.000.000,00
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1	65.000.000,00
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1	65.000.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	350	850.000.000,00

		Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
	<b>TOTAL</b>			<b>15.797.087.898,0 0</b>

## BAB V

### P E N U T U P

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas peserta dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi *pencapaian* hasil. pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan sinergitas dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program dengan unit-unit kerja/instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat. provinsi. kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat dijadikan bahan kajian sehingga keberadaannya dapat mendukung Pemerintahan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : Oktober 2025

KEPALA BADAN



**H. MUKTI, SE, ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002